

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT karena penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DKPSP2KB) telah dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Rencana Kerja DKPSP2KB Provinsi Riau merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk Tahun 2018.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DKPSP2KB) Tahun 2018. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN
SIPIIL, PENGENDLIAN POENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANAA

H. ANDRA SJAFRIL.SKM.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681118 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-4
C. Maksud dan Tujuan.....	I-6
D. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-7
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-8
D. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-26
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
A.....	Te
lahaan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
B.....	Tu
juan dan Sasaran Renja SKPD 2018	III-7
C.....	Pr
ogram dan Kegiatan	III-11
BAB IV. PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Penyusunan RENJA OPD yaitu : Persiapan Penyusunan Renja OPD, Tahap Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum OPD dan Tahap Penetapan Renja OPD.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada tahun 2017 menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Rencana Kerja Dasa Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Rencana Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja Dinas Kependudukan

Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2017-2019.

Visi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yaitu "***Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Database yang Akurat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menuju Riau Sejahtera***".

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau pada Tahun 2018.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

- Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019;
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
 20. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tahun 2017-2019.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2018 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas

Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau;
2. Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2018.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini pada dasarnya memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD yang sudah disahkan melalui peraturan Daerah. Namun oleh karena Daerah Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka pada bab ini yang akan disajikan adalah perkiraan capaian tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1. REKAPITULASI PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2017 PROVINSI RIAU

DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015							Target Program dan Kegiatan (RENJA SKPD Tahun 2017)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2017			
						Target Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4		5			6		7		8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.2.06.01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik																	
1.2.06.1.2.06.0 1.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat Dinas, Undangan, SK dan Nota Dinas	12	Bulan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	190	buah	30.000.000	190	30.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan, rekening telepon, Sumber Daya Air, dan Belanja Internet.	12	Bulan	324.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	30.000.000	12	30.000.000	50
1.2.06.1.2.06.0 1.01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan, perangkat kebersihan lainnya dan jumlah petugas kebersihan	12	Bulan	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	80.000.000	12	80.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.17	Penyediaan Makanan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minum Pegawai	12	Bulan	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	50.000.000	12	50.000.000	50
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Aman dan Nyaman	12	Bulan	202.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	202.000.000	12	202.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	74.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	50.000.000	12	50.000.000	50
1.2.06.1.2.06.0 1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Pegawai	12	Bulan	88.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	65.000.000	12	65.000.000	50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan		12		50

1.2.06.1.2.06.0 1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya dana untuk Rapat Koordinasi ke luar daerah	12	Bulan	374.434.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	374.434.976	12	374.434.976	50
1.2.06.1.2.06.0 1.01.3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	65.000.000	12	65.000.000	40
1.2.06.02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja (%)																				
1.2.06.1.2.06.0 1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	12	Bulan	92.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Bulan	50.000.000	12	50.000.000	30
1.2.06.03	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur																				
1.2.06.1.2.06.0 1.03.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	80	orang	89.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	orang	10.000.000	16	10.000.000	
3.00.03.02.03.0 06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	80	orang	89.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	orang	10.000.000	16	10.000.000	
1.2.06.06	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketepatan penyampaian laporan Keuangan																				
1.2.06.1.2.06.0 1.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dokum en	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	dokum en	40.000.000	29	40.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.06.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2	dokum en	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	dokum en	15.000.000	15	15.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.06.4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	1	dokum en	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	dokum en	15.000.000	15	15.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.06.5	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1	dokum en	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	dokum en	60.000.000	60	60.000.000	60

1.2.06.15	PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																				
1.2.06.1.2.06.0 1.15.02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	30	orang	134.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	orang	133.685.000	24	133.685.000	65
1.2.06.1.2.06.0 1.15.09	Pengembangan Database Kependudukan	Terealisasinya Pengembangan Database Kependudukan	12	Kab/ko ta	269.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Kab/kot a	269.724.000	12	269.724.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.15.11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Di bidang Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil	110	orang	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	orang	450.000.000	120	450.000.000	45
1.2.06.1.2.06.0 1.15.19	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Persamaan Persepsi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	70	orang	240.550.000											30	orang	255.548.000	30	255.548.000	75
1.2.06.1.2.06.0 1.15.25	Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	Penerapan KTP-el yang dimonitor	12	Kab/ko ta	150.000.000											12	kab/kot a	150.000.000	12	150.000.000	75
1.2.06.1.2.06.0 1.15.27	Peningkatan Peran Serta Lembaga Non Pemerintah	Jumlah Keikutsertaan Lembaga Non Pemerintah	45	orang	150.000.000											50	orang	150.000.000	50	150.000.000	75
1.2.06.1.2.06.0 1.15.30	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Adminduk	Pengelola Dokumen Adminduk yang dilatih	50	orang	255.340.000											60	orang	275.344.000	60	275.344.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.15.32	Penyusunan Profil Kependudukan Berbasis Database SIAK	Jumlah Buku Profil Kependudukan Berbasis Database SIAK yang disusun	50	buku	150.000.000											50	buku	150.000.000	50	150.000.000	60
1.2.06.1.2.06.0 1.15.33	Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Tenaga yang dilatih tentang Kearsipan dan Pencatatan Sipil	30	orang	181.700.000											30	orang	171.710.000	30	171.710.000	70
1.2.06.1.2.06.0 1.15.37	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Kependudukan	252	orang	375.000.000											200	orang	450.000.000	200	450.000.000	60
1.2.06.16	PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARA AN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																				
1.2.06.1.2.06.0 1.16.01	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/Petugas sebagai administrator ADMINDUK yang dilatih	70	orang	284.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	orang	350.000.000	100	350.000.000	60

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan , Pelaksanaan Administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Gubernur terkait dengan fungsi pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yaitu :

1. Jumlah Tenaga Penataan ADM Kependudukan yang ditingkatkan (orang)
2. Jumlah Peningkatan Peran serta Gender (orang)
3. Meningkatnya Jumlah Akseptor KB (orang)
4. Meningkatnya jumlah Akseptor K baru dengan MKJP Metoda kontrasepsi jangka panjang (oang)
5. Meningkatnya jumlah remaja yang dikonseling (orang) dan Pusat Informasi

Konseling (PIK)

Dari Indikator Kinerja diatas Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya dan Meningkatnya Penataan ADM Kependudukan.Meningkatnya Peran serta Gender, Akseptor KB, dan Meningkatnya Jumlah remaja yang dikonseling dan Pusat Informasi konseling melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pembinaan terhadap stake holder dan Masyarakat internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. .

II.4. Rancangan Awal RKPD

**TABEL II.4. RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2018
PROVINSI RIAU**

DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI RIAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan	190 surat	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan	190 surat	13.950.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bln	12 bulan	324.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bln	12 bulan	324.000.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	Tercipta kantor yang bersih dan rapi	12 bulan	198.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	Tercipta kantor yang bersih dan rapi	12 bulan	198.000.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln	1 paket	88.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Pekanbaru	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bln	1 paket	87.454.200

5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln	12 bulan	59.970.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln	12 bulan	59.970.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama	12 bulan	78.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekanbaru	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama	12 bulan	62.000.000
7	Penyediaan makanan dan minuman	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bln	12 bulan	110.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk 12 bln	12 bulan	133.800.000
8	Penyediaan jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bln	12 bulan	202.000.000	Penyediaan jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 12 bln	12 bulan	201.600.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pekanbaru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bln	12 bulan	331.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pekanbaru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bln	12 bulan	444.597.000
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	12 bulan	48.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	12 bulan	71.175.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor BPSDM Provinsi Riau	1 unit kantor, 4 unit asrama, ruang belajar dan 1 aula	136,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor BPSDM Provinsi Riau	1 unit kantor, 4 unit asrama, ruang belajar dan 1 aula	-

2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin secara/berkala perlengkapan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	-	350,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin secara/berkala perlengkapan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	1 unit kantor, 4 unit asrama, ruang belajar dan 1 aula	-
3	Pengadaan Mebeluer	Pekanbaru	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	-	500,000,000	Pengadaan Mebeluer	Pekanbaru	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor		-
4	Pembangunan Gedung kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau (3 lantai)	Pekanbaru	Terbangunnya kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	Pembangunan Gedung kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau (3 lantai)	Pekanbaru	Terbangunnya kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-
5	Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	Pekanbaru	Terbangunannya balai diklat yang berada dipasir putih	-	-	Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	Pekanbaru	Terbangunannya balai diklat yang berada dipasir putih		-
6	DED Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pekanbaru	Tersedianya DED Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	DED Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pekanbaru	Tersedianya DED Gedung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-
7	Pembangunan Gedung Asrama Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau (3 Lantai)	Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Pembangunan Gedung Asrama Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau (3 Lantai)	Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama Pendidikan dan Pelatihan		-
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									

1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Pekanbaru	Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan	12 bulan	120.000.000	Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Pekanbaru	Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan	12 bulan	150.224.800
IV	Program Penataan Administrasi Kependudukan					-	-	-	-	
1	Pengembangan Database Kependudukan	Pekanbaru	Terlaksananya Pengembangan Database Kependudukan	12 Kab/Kota	100.000.000	Pengembangan Database Kependudukan	Pekanbaru	Terlaksananya Pengembangan Database Kependudukan	12 Kab/Kota	100.000.000
2	Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	Pekanbaru	Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	12 Kab/Kota	150.000.000	Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	Pekanbaru	Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	12 Kab/Kota	100.000.000
3	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Pekanbaru	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Kependudukan	12 bulan	250.000.000	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Pekanbaru	Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Kependudukan	12 bulan	250.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pekanbaru	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	40.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pekanbaru	Terlaksananya Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	-

2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Pekanbaru	Tersusunnya penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun	12 bulan	30.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Pekanbaru	Tersusunnya penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun	12 bulan	
3	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Pekanbaru	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	12 bulan	50.000.000	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Pekanbaru	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	12 bulan	-
VI	Program Keluarga Berencana									
1	Pelayanan KIE	Pekanbaru	Terselenggaranya 2 Momen Pencanaan (IBI KB KES & PKK KB KES)	12 bulan	200.000.000	Pelayanan KIE	Pekanbaru	Terselenggaranya 2 Momen Pencanaan (IBI KB KES & PKK KB KES)	12 bulan	200.000.000
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Pekanbaru	Jumlah Akseptor KB Aktif yang Dibina	500 orang	500.000.000	Pembinaan Keluarga Berencana	Pekanbaru	Jumlah Akseptor KB Aktif yang Dibina	500 orang	500.000.000
3	Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pekanbaru	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Konselor pada PIK R dan PIK RM	60 orang	320.000.000	Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pekanbaru	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Konselor pada PIK R dan PIK RM	60 orang	320.000.000
4	Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur	Pekanbaru	Meningkatnya Pengetahuan dan Kasadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Menggunakan Alat Kontrasepsi	200 orang	250.000.000	Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur	Pekanbaru	Meningkatnya Pengetahuan dan Kasadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Menggunakan Alat Kontrasepsi	200 orang	250.000.000
JUMLAH										3.465.013.500.-

II.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

BAB III

Tujuan dan Sasaran

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Rencana Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau 2014 – 2019 mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 - 2019 . Secara sfesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Disisi lainya Rencana Strategis Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau 2014 – 2019, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pmebangunan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan kependudukan Keluarga Berencana Nasional serta Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau. Oleh sebab itu Rencana Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau 2014 - 2019, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

**1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri .**

VISI

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015.

MISI

Salah satu visi dari dari Dirjen kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

Untuk bidang kependudukan dan pencatatan sipil, telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait agenda: (1) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (2) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (3) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (4) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan. Terkait agenda dimaksud, telah dihasilkan regulasi baru, revisi dan draft regulasi dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, dan kesepakatan bersama lingkup tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2 Perpres sebagai perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional; serta 8 Permendagri terkait NSPK di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. terlaksananya konsolidasi sistem atau standarisasi database kependudukan kabupaten/kota berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 497 kabupaten/kota; terlaksananya kegiatan Strategis Nasional yang diawali pada tahun 2010 dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan di 497 Kabupaten/Kota; terlaksananya Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2011 bagi penduduk setelah dilakukan pemutakhiran data dan coklit oleh aparat kecamatan dan RT/RW; terlaksananya Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) dengan realisasi blangko+chip sebanyak 172 juta keping,

personalisasi sebanyak 145 juta keping, dan distribusi sebanyak 145 juta keping. ; sesuai amanat UU I-8 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Tahun 2014 urusan administrasi kependudukan untuk pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; terlaksananya bimbingan teknis kepada petugas operator kecamatan untuk 6.996 kecamatan yang di pusatkan di masing-masing ibukota di 497 kabupaten/kota; terlaksananya pengadaan, distribusi dan penginstalan perangkat e-ktp untuk 497 kabupaten/kota dan masing-masing kecamatan sebanyak 2 unit perangkat SIAK; terlaksananya pengadaan jaringan komunikasi data ke 497 kabupaten/kota dan 6.996 kecamatan; terlaksananya supervisi penerapan KTP Elektronik ke 497 kabupaten/kota; terlaksananya pembekalan teknis bagi operator SIAK dalam rangka sinkronisasi data dan validasi data sebanyak 4 angkatan di 497 kab/kota; terselenggaranya sosialisasi penerbitan NIK Nasional kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat, dialog interaktif, billboard dan banner; tersedianya Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2 ,

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk

mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian Dalam Negeri dengan program Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yaitu program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan program Penataan Administrasi kependudukan.

2. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAND DAERAH

Dinamika dalam lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum, mendorong perlunya mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan berbasis wilayah, ekonomi dan berdaya saing secara profesional dan berkelanjutan. Guna mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang ditetapkan merupakan peran yang strategis yang diinginkan dalam pencapaian visi diatas, yaitu menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya:

1. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
2. Mendorong dan memfasilitasi keserasian pembangunan berbasis wilayah.
3. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dan daya dukung perekonomian daerah.
4. Mendorong dan memfasilitasi penataan ruang daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mendorong dan memfasilitasi penataan perkotaan.
6. Mengembangkan profesionalisme aparat dan dukungan sistem pelayanan yang lebih baik.

Keterkaitan antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah dalam koordinas tentang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dituangkan dalam Program Keluarga Berencana, Pembinaan Keluarga Berencana, dan Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga Berencana (KB)/Kesehatan reproduksi (KR) yang mandiri.

3. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional yang disingkat dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keluarga Berencana. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKKBN adalah ***"Menjadi lembaga yang***

handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas " untuk mewujudkan cita-cita tersebut dicapai melalui melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Menurus-mengutanaakan pembangunan berwawasan Kependudukan;
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Kelaurga ;
- e. Membangun dan Menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan ,penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri dan Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKBN) yaitu program Program Keluarga Berencana, Pembinaan Kelaurga Berencana, dan Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga Berencana (KB)/Kesehatan reproduksi (KR) yang mandiri.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2018

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam bidang kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Di provinsi Riau. Untuk itu disusun Visi dan Misi Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 yaitu “Visi yang disampaikan oleh Gubernur terpilih periode 2014-2019 yakni **“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, Masyarakat yang Sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersediannya lapangan kerja serta pematapan aparatur”**

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 misi, namun diantaran kesembilan misi yang terkait dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah:

1. Misi ketiga : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
2. Misi keempat : Menurunkan Kemiskinan

Visi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah "***Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Data Base yang akurat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menuju Riau Sejahtera***"

Adapun misi yang ingin dijalankan berdasarkan visi diatas adalah :

Visi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang ditetapkan merupakan peran serta strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Kualitas data dan Informasi yang akurat administrasi kependudukan
3. Meningkatkan keluarga yang mempunyai Ketahanan fungsi keluarga
4. Mewujudkan Pusat Informasi Konseling Keluarga guna menuju keluarga sejahtera
5. Meningkatkan peserta Akseptor KB Aktif
6. Meningkatkan dukungan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana dan keluarga sejahtera
7. Meningkatkan pengendalian penduduk berbasis keluarga yang seimbang

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada visi organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang akurat ;
2. Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan pengendalian penduduk berbasis keluarga yang seimbang dan keluarga sejahtera

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang baik
2. Terwujudnya keluarga berencana yang aktif dan keluarga sejahtera
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal SKPD.

III.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakraan Maju Tahun 2018

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana/Pagu Indikatif
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		URUSAN WAJIB								
1	02	NON PELAYANAN DASAR								
1	02	1 02 06 0101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	02	1 02 06 0101001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya kelancaran dalam proses administrasi surat menyurat	Pekanbaru	190 surat	13.950.000	APBD		190 surat 13.950.000
1	02	1 02 06 0101002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pekanbaru	12 bulan	324.000.000	APBD		12 bulan 324.000.000
1	02	1 02 06 0101008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk kesehatan pegawai	Pekanbaru	12 bulan	198.000.000	APBD		12 bulan 198.000.000
1	02	1 02 06 0101017	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	Pekanbaru	2.529 porsi	133.795.000	APBD		2.529 porsi 133.800.000
1	02	1 02 06 0101019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Aman dan Nyaman	Pekanbaru	12 bulan	201.600.000	APBD		12 bulan 201.600.000

1	02	1	02	06	0101011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	12 bulan	59.970.000	APBD		15 jenis	59.970.000
1	02	1	02	06	0101010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Pegawai	Pekanbaru	12 bulan	87.454.200	APBD		30 jenis	87.454.200
1	02	1	02	06	0101012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	12 bulan	62.000.000	APBD		12 bulan	62.000.000
1	02	1	02	06	0101018	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya dana untuk Rapat Koordinasi ke luar daerah	Riau dan Luar Daerah	12 bulan	444.321.000	APBD		12 bulan	444.597.000
1	02	1	02	06	0101003	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	Pekanbaru	20 unit	71.175.000	APBD		20 unit	71.175.000
1	02	1	02	06	0101015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pekanbaru	50 buku	10.000.000	APBD		50 buku	10.000.000
1	02	1	02	06	0106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	02	1	02	06	0106001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pekanbaru	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 laporan	50.000.000

1	02	06	1	02	060115	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
1	02	06	1	02	060115009	Pengembangan Database Kependudukan	Terwujudnya Pengembangan Database Kependudukan	Pekanbaru	12 bulan	100.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
1	02	06	1	02	060115025	Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el	Tersedianya Laporan Monitoring Penerapan KTP-el	Pekanbaru	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 laporan	150.000.000
1	02	06	1	02	060115037	Peningkatan Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam tertib administrasi kependudukan	Pekanbaru	120 orang	250.000.000	APBD		120 orang	375.000.000
1	02	08	1	02	060115	Program Keluarga Berencana								
1	02	08	1	02	060115002	Pelayanan KIE	Meningkatnya Partisipasi Program KB, Rasio Akseptor KB Aktif Per Jumlah Pasangan Usia Subur	Pekanbaru	200 orang	200.000.000	APBD		200 Orang	200.000.000
1	02	08	1	02	060115005	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Peran serta masyarakat yang dibina dalam Program KB	Pekanbaru	500 orang	500.000.000	APBD		500 orang	800.000.000
1	02	08	1	02	060115008	Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Konselor pada PIK R dan PIK RM	Pekanbaru	60 Orang	320.000.000	APBD		60 Orang	500.000.000
1	02	08	1	02	060115010	Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran PUS utk Menggunakan Alat Kontrasepsi	Pekanbaru	200 orang	250.000.000	APBD		200 orang	250.000.000
JUMLAH														

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf inas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengandaian Berencana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.